



VOTER'S EDUCATION DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI DESA DUAMPANUA

Article history

Received: Maret 2022

Revised: Maret 2022

Accepted: Maret 2022

DOI: 10.35329/sipissangngi.v2i1.2844

¹Abdul Malik, ¹Syaripuddin, ¹Harianto

¹Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

abdulmalik@mail.unasman.ac.id

Abstrak

Desa Duampanua adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar. Yang dihuni oleh sekitar ± 936 kk, dari banyaknya jumlah masyarakat banyak pula yang kurang paham dalam pelaksanaan pemilihan umum terutama bagi pemilih pemula. Mekanisme pelaksanaan pemerintahan demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu) yang awalnya hanya untuk memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif tetapi juga digunakan sebagai mekanisme dalam pemilihan kepala Daerah dan Desa. Bagaimana diketahui di Polewali Mandar akan dilaksanakan Pilkades serentak pada bulan November di beberapa Desa di Kab. Polewali Mandar salah satunya Desa Duampanua. Maka dari itu mahasiswa Program Unasman Membangun Desa (PUMD) yang ada di Desa Duampanua bekerjasama dengan Bawaslu dan pemerintah Desa Duampanua memberikan pemahaman dalam mensosialisasikan penyuluhan pendidikan pemilih pemula terhadap masyarakat Desa Duampanua. Potensi pemilih pemula di Indonesia cukup besar dengan jumlah pemilih pemula yang signifikan. Pemilih adalah warga Negara yang mesti difasilitasi dengan baik untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas di bilik suara. Idealnya dalam menjatuhkan pilihan, pemilih menggunakan kalkulasi yang rasional dan ilmiah berdasarkan pada pengetahuan, kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk membangun bangsa dan Negara. Untuk menuntun masyarakat menjadi pemilih yang sukarela, mandiri, rasional dan cerdas maka mereka perlu diberi pengetahuan dan ditumbuhkan kesadaran politiknya. Di sinilah pentingnya penyelenggaraan pendidikan bagi pemilih pemula.

Kata kunci: *desa duampanua, pemilih pemula, voter's education*



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan PUMD pendidikan pemilih pada pemilih pemula

1. PENDAHULUAN

Mekanisme pelaksanaan pemerintahan demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu). Pendidikan adalah proses mencanankan nilai-nilai tertentu kepada satu generasi untuk membentuk perilaku dan sikap. Nilai itu diinginkan menjadi petunjuk dan awal inspirasi ketika melihat dan menghadapi sesuatu hal. Membahas mengenai pemilihan umum erat kaitannya dengan politik maka itu dalam buku politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Budiardjo M, 2003).

Pendidikan Pemilih dalam hal pelaksanaan pemilihan umum adalah pendidikan untuk mencanankan nilai terkait tentang pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri (Irawan, 2019). Dilain itu pemilih adalah setiap warganegara yang telah memenuhi persyaratan untuk sebagai pemilih ketika pelaksanaan pemilu/pemilihan. Indonesia selama ini memakai batas usia 17 tahun dan atau telah menikah serta berkewarganegaraan Indonesia sebagai syarat untuk disebut sebagai pemilih. Pendidikan pemilih dengan demikian adalah usaha untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan pemilu dan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kepada warganegara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu (Rahman, A. 2018).

Dalam pendidikan pemilih di dalamnya mencakup pemberian informasi kepiluan, pemahaman mengenai aspek-aspek pemilu serta demokrasi. Rasionalitas, kecerdasan, dan kemandirian pemilih menjadi sangat penting dalam peningkatan kualitas partisipasi masyarakat serta kualitas hasil pemilu (Richardo F Butarbutar, J. J. 2019).

Menurut (Husni Kamil Manik, S. P. dkk. 2015) Pendidikan pemilih penting karena beberapa alasan :

1. Membantu penyelenggara pemilu melaksanakan pemilu dengan baik. Semakin banyak pemilih yang paham dengan proses pemilu dan demokrasi dapat meringankan dan memudahkan kerja dari penyelenggara pemilu karena masing-masing sudah paham dengan proses dan bagaimana pemilih seharusnya bertindak.
2. Meningkatkan partisipasi pemilih. Kesadaran tentang pentingnya penggunaan suara dalam pemilu dilakukan secara intensif dan luas sehingga partisipasi pemilih dapat meningkat.
3. Meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Angka kecurangan pemilu, konflik pemilu, mobilisasi pemilih dapat dikurangi sedemikian rupa melalui pendidikan pemilih sehingga menghasilkan pemenang pemilu yang berkualitas.
4. Memperkuat sistem demokrasi. Pendidikan pemilih membentuk nilai dan kesadaran akan peran, hak, kewajiban dan tanggung jawab pemilih dalam sistem demokrasi. Ini akan memperkuat advokasi warganegara terhadap sistem demokrasi dibandingkan sistem politik lain.

Pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama pemilih rasional, yakni pemilih yang benar-benar memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih. Pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-12 tahun (Fenyapwain, 2013).

Prinsip-prinsip pendidikan pemilih menurut (Husni Kamil Manik, S. P. dkk. 2015) prinsip dalam KBBi dipahami sebagai pokok dasar yang menjadi dasar berfikir atau bertindak. Dalam program pendidikan pemilih, yang menjadi dasar berfikir dan bertindak adalah sebagai berikut :

1. Segmentasi
Segmentasi adalah pembilahan sosial yang ada dalam masyarakat. Masyarakat terpilah ke dalam kelompok pemilih homogen yang potensial. Baik itu potensial dari sisi jumlah maupun potensial dari sisi masalah yang dihadapinya.
2. Kontekstual
Kontekstual dalam arti sesuai dengan situasi mutakhir (kekinian) dan kondisi setempat.
3. Orientasi Kepada Pemilih
Kepentingan pemilih sebagai warganegara menjadi pusat penguatan, pemilih harus dikuatkan di hadapan pemerintah dan elemen non-demokratis lainnya.
4. Partisipatif
Partisipatif artinya melibatkan segenap pemangku kepentingan. Keterlibatan itu meliputi keseluruhan proses pendidikan pemilih mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
5. Berkesinambungan
Pendidikan pemilih dilakukan secara berkesinambungan dalam arti penyelenggaraannya meliputi periode pemilihan dan periode di luar masa pemilihan. Pendidikan pemilih tidak berhenti hanya pada masa pemilihan.

Mengingat pemilih pemula merupakan pemilih yang jumlahnya lebih banyak dari pemilih lainnya dan juga pemilih yang baru pertama kali melakukan pemilihan umum, sehingga pemilih pemula menjadi incaran politisi karena mudah dipengaruhi (Luthfia Sari, A.R. 2020). Demikian juga pendapat dari (Setiawaty, D. 2014) bahwa Potensi pemilih pemula di Indonesia cukup besar seiring dengan jumlah pemilih pemula yang signifikan. Akan tetapi potensi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat khususnya di kalangan pemilih pemula karena adanya pikiran apatisisme publik kepada kinerja pemerintah.

Dalam penyuluhan pendidikan pemilih sudah pasti yang disasar adalah beberapa kelompok dan yang khususnya kepada pemilih pemula. Berikut adalah tabel 1 data jumlah penduduk di setiap dusun di Desa Duampanua.

Tabel 1. Jumlah penduduk di Desa Duampanua Tahun 2021

No.	Dusun/ Lingkungan	Jumlah KK	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Beluak	106	630
2	Batupapan	213	783
3	Tibakan	185	718
4	Salupana	138	535
5	Basseang	234	824
Jumlah		936	3490

Sumber : Kantor Desa Duampanua

Pendidikan pemilih dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada keterlibatan pemilih pada keseluruhan periode siklus pemerintahan, yaitu pada periode pemilihan dan di luar pemilihan.

Di Desa Duampanua yang akan menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa di bulan November mendatang aparat dan masyarakatnya sangat terbantu dengan hadirnya sosialisasi pendidikan pemilih pemula di desa tersebut karena diketahui kurangnya pemahaman dan pengetahuan secara leluasa mengenai pemilihan umum dan tata cara melaporkan kesalahan, kecurangan kekeliruan di dalam pemilihan tersebut dengan itu kami mahasiswa Program Unasman Membangun Desa (PUMD) bekerjasama dengan Bawaslu Polewali Mandar dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

2. METODE

Kegiatan pendidikan pemilih pemula dilaksanakan melalui *Voter's Education* (Pendidikan Pemilih) pada pemilih pemula di Aula Kantor Desa Duampanua tertanggal 9 September 2021 dengan bermitra atau bekerjasama dengan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Metode kegiatan dipaparkan sesuai dengan yang digambarkan berikut.



Gambar 2. Bagan alur kegiatan pendidikan pemilu pemula

- Berdasarkan gambar 2 maka tahapan kegiatan dideskripsikan sebagai berikut :
1. Observasi Awal, yaitu melakukan wawancara dan observasi awal di Desa Duampanua tentang bagaimana pemahaman dan pengetahuan masyarakat dalam memahami pemilihan.
 2. Koordinasi, berkoordinasi beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, aparat desa serta berkoordinasi bersama mitra yang juga terlibat di dalamnya yakni Bawaslu.
 3. Pelaksanaan Kegiatan, dilakukan dengan cara seminar atau sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Duampanua.
 4. Evaluasi bersama kepada beberapa peserta dan mitra yang terlibat di kegiatan ini yakni tokoh masyarakat, pemerintah desa dan Bawaslu apa saja yang bisa diterapkan dalam pemilihan dan hasil yang akan dicapai kedepannya.



Gambar 3. Pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih pemula

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum penyampaian materi kepemiluan dilakukan pengabdian terlebih dahulu membuat pretest pada peserta untuk mengetahui sampai mana pengetahuan peserta. Dan Setelah paparan materi pendidikan pemilih pemula diberikan, pengabdian lagi membuat posttest kepada peserta untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta penyuluhan pendidikan pemilih pemula setelah dan sebelum diberikan materi (Ansori, Z. 2018). Hasilnya sebagaimana tabel 2 berikut.

Tabel 2. Pemahaman peserta sebelum materi

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	%
Sebelum Materi				
1	Apa yang diketahui tentang pemilih umum?	Kegiatan memilih pemimpin apabila mencalonkan	15	50
		bagi-bagi sembako	10	33
		Perebutan kekuasaan	5	17
			Jumlah	100
2	Apa itu pemilih pemula dalam pemilu?	Orang yang namanya baru terdaftar di pemilihan	6	17
		Baru pertama kali dalam memilih	25	83
			Jumlah	100

Sumber : Hasil pretest

Tabel 2 memperlihatkan sebelum materi dipaparkan oleh narasumber, pemahaman tentang pendidikan pemilu dan pemilih pemula masih terbatas pada pertanyaan pertama meskipun 50% mereka memahami pemilu sebagai kegiatan memilih calon pemimpin; 33% memahami sebagai ajang pembagian sembako; 17% memahami pemilihan umum sebagai perebutan kekuasaan. Sedangkan pada pertanyaan kedua pada jawaban pertama 17% memahaminya sebagai orang yang namanya baru terdaftar di pemilihan atau Tempat Pemungutan Suara (TPS); 83% nya lagi memahami bahwa pemilih pemula orang yang baru pertama kali memilih dalam pemilihan sedangkan umurnya sudah 18 tahun keatas dalam hal ini mereka mengartikannya sebagai pemilih golput belakangan ini.

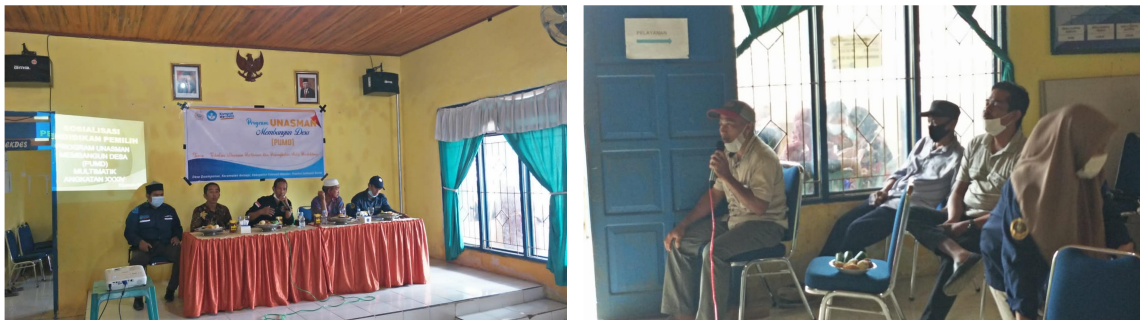
Tabel 3. Pemahaman peserta sesudah materi

No	Pertanyaan	Jawaban	Jumlah	%
Sesudah Materi				
1	Apa yang diketahui tentang pemilih umum?	Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan	25	83

		wakil presiden		
		Sarana sirkulasi kepemimpinan dalam politik	6	17
			Jumlah	100
2	Apa itu pemilih pemula dalam pemilu?	UU No. 10 tahun 2008 Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah WNI yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan UU Pemilu.	85	100
			Jumlah	100

Sumber : Hasil post test

Tabel 3. Memperlihatkan adanya perubahan pemahaman masyarakat tentang pemilu dan pemilih pemula sekaligus perubahan sikap mereka terhadap isu golput setelah narasumber selesai memaparkan materi. Ketika ditanya apa yang diketahui tentang pemilu dan pemilih pemula? Sebanyak 83% mereka mampu memberikan jawaban dengan sangat baik, hanya 17% persen yang menjawab kurang baik. Sedangkan ketika pertanyaan pemilih pemula 100% menjawab dengan benar karena sudah didasari dengan UU walaupun masih dalam bentuk catatan dan masih ragu dalam menyampaikan.



Gambar 5. Pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih pemula

4. SIMPULAN

Pendidikan pemilih akan memperkuat demokrasi dan pemilu yang berkualitas. Kerja sistematis untuk melakukan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula perlu dilakukan. Potensi pemilih pemula di Indonesia cukup besar seiring dengan jumlah pemilih pemula yang signifikan. Akan tetapi potensi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat khususnya di kalangan pemilih pemula juga diprediksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya apatisme publik dikarenakan kinerja pemerintah yang tidak memuaskan. Voter's Education (Pendidikan Pemilih) adalah sebuah langkah strategis untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Pemilih yang cerdas akan menghasilkan pemimpin yang cerdas pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Z. (2018). Pendidikan Pemilih sebagai Metode Meningkatkan Partisipasi dan Keterampilan Pemilih Pemula Menggunakan Hak Pilihnya dalam Pemilu. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1, 49-62.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fenyapwain, M. M. (2013). Pengaruh iklan politik dalam pemilukada Minahasa terhadap partisipasi pemilih pemula di desa Tounalet kecamatan Kakas. *ACTA DIURNA KOMUNIKASI*, 2.
- Husni Kamil Manik, S. P. (2015). *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: KPU RI.
- Irawan, A. D. (2019). Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Serentak 2019. *Jurnal Hukum Replik*, 7, 55-70.
- Luthfia Sari, A. R. (2020). Pelaksanaan Program Rumah Pintar Pemilu Sebagai Sarana Pendidikan Pemilih. *Journal of Civic Education*, 3, 119-126.
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10, 44-51.
- Richardo F Butarbutar, J. J. (2019). Program Pendidikan Pemilih Dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Masyarakat Dan Regulasi Yang Mengaturnya Dan Malpraktik Dalam Pelaksanaannya. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6, 358-373.
- Setiawaty, D. (2014). Mendorong Partisipasi Pemilih Muda Melalui Pendidikan Politik Yang Prognatik. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 3, 117-146.